

BAB I

PENDAHULUAN

A. Agama Leluhur

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki masyarakat yang cukup banyak menganut kepercayaan lokal adalah Tulungagung, Jawa Timur. Di daerah ini, politik sehari-hari penghayat kepercayaan menjadi salah satu permasalahan yang cukup penting untuk diteliti. Banyak sekali praktik-praktik kepercayaan yang masih dilakukan oleh masyarakat di daerah ini, seperti perdukunan, keramat, dan lain sebagainya. Namun, seringkali praktik-praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat penghayat kepercayaan di Tulungagung sering mengalami diskriminasi dan peminggiran dari masyarakat lain yang dianggap lebih modern. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana politik sehari-hari penghayat kepercayaan di Tulungagung dan bagaimana praktik-praktik kepercayaan tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat di daerah tersebut.

Selain itu, permasalahan politik sehari-hari penghayat kepercayaan di Tulungagung juga dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah seringkali menganggap praktik-praktik kepercayaan tersebut sebagai sesuatu yang menghambat perkembangan, sehingga seringkali mencoba untuk melarang atau mengendalikan praktik-praktik tersebut. Namun, hal ini justru dapat menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat penghayat kepercayaan, karena praktik-praktik tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan dan budaya mereka. Oleh karena itu, perlu ada komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat penghayat kepercayaan untuk mengatasi permasalahan politik sehari-hari ini.

Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang politik sehari-hari penghayat kepercayaan di Tulungagung, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana praktik-praktik kepercayaan diterima atau ditolak oleh masyarakat. Hal ini penting untuk menyediakan solusi yang tepat dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat penghayat kepercayaan di daerah tersebut. Dengan begitu, dapat dicapai kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh warga masyarakat, terlepas dari agama atau kepercayaan yang dianut.

Secara umum Indonesia adalah negara dengan multi-etnis dan multi-agama. Kalau kita berbicara soal agama, sesungguhnya warga negara Indonesia tidak hanya menganut 6 (enam) agama saja. Masih banyak sekali kepercayaan dan keyakinan di luar ke-enam agama tersebut. Mereka ini banyak sekali memiliki sebutan, seperti agama leluhur, agama lokal, agama nusantara, bahkan sering diidentikan sebagai kearifan lokal. Mereka yang masuk ke dalam kategori tersebut dalam banyak literatur adalah mereka yang masih menjalankan praktik-praktik seperti animis, magis, adat, budaya dan lain sebagainya. Praktik-praktik yang mungkin juga dikenal sebagai semedi, sesajen, berziarah ke gunung, hutan, makam, dlsbnya, bersih desa dll.

Ada berbagai hal yang membuat keberadaan mereka sulit diakui. Salah satu di antaranya adalah politik agama. Politik agama di Indonesia membuat hanya ada 6 (enam) agama saja yang bisa diakui sebagai agama. Penganut di luar itu sulit mendapatkan pengakuan sebagai agama dan dipaksa menyangand berbagai macam label terhadap kepercayaannya. Sebutan kepercayaan dan keyakinan di luar agama yang diakui, diantaranya, agama leluhur, agama lokal, agama nusantara, bahkan sering juga diidentikan sebagai kearifan lokal. Karena negara tidak mengakui keyakinan yang mereka anut, hal ini berdampak pada hilangnya hak sebagai warga negara Indonesia.

Politik agama adalah upaya beberapa kelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat kontrol dan legitimasi bagi warga negara lainnya. Upaya ini tentu saja dilakukan dengan jalan melakukan mobilisasi dan tekanan massa atas nama mayoritas, menggunakan partai politik sampai pada masuk ke dalam kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan. Melalui politik agama, agama didefinisikan sangat terbatas dan tertutup. Definisi ini didasarkan pada agama tertentu yang diklaim sebagai agama dominan dan dipaksakan sebagai identitas ke semua warga negara Indonesia.

Sebagai sebuah kebijakan ini juga digunakan sebagai standar kategori beragama dan bukan/belum beragama. Kelompok yang memiliki kekuatan politik dan agamanya berhasil menyesuaikan dengan standar agama yang sudah ditentukan tersebut, bisa memperoleh status kewarganegaraan dan agamanya dijadikan agama resmi negara. Sedangkan kelompok yang tidak bisa menyesuaikan terhadap hal tersebut, sulit secara legal menjadi warga negara, sehingga tidak mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari negara. Hal ini secara tidak langsung mereka dipaksa, dikontrol dan ditundukan atas nama politik agama.

Mereka yang tidak masuk dalam standar agama negara terus menerus menjadi objek pendefinisian. Karena itu kelompok ini mendapat banyak sekali penamaan, pendefinisian dan pelabelan. Kelompok ini memiliki beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkaninya yaitu, agama leluhur, agama lokal, agama nusantara, agama asli, bahkan sering disebut sebagai kearifan lokal. Merujuk pada istilah yang dipakai oleh Samsul Maarif, agama leluhur dalam berbagai literatur dan wacana publik merujuk pada kelompok yang masih menjalankan praktik-praktik animis, magis, adat, budaya. Sedangkan secara umum bisa dikenali dengan berbagai praktik seperti semedi, sesajen, mengunjungi hutan, gunung, hutan, sungai, bersih desa, dll.

Politik membuat keberadaan agama ini berbeda dengan agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama ini biasanya dinarasikan sebagai agama impor dan agama leluhur adalah agama asli nusantara. Sayangnya perkembangan selanjutnya membuat agama impor menjadi agama resmi negara, sedangkan agama asli didiskreditkan, didiskriminasi dan dikriminalisasi. Keberadaanya justru hendak dihancurkan, dimusnahkan dan dianggap sebagai penghambat kemajuan. Politik jugalah membuat kelompok agama leluhur ini harus menganut agama yang diakui oleh negara. Sebab bertahan pada agama leluhur, bisa membahayakan dan mengancam keselamatan.

Secara politik kelompok ini tampak sulit untuk mendapatkan pengakuan. Tentu saja pandangan politik semacam ini adalah pandangan politik konvensional.

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin menggunakan pandangan politik yang jarang atau bahkan tidak pernah digunakan untuk melihat perjuangan kelompok yang tidak memiliki kekuatan untuk merubah keadaan dirinya, seperti halnya kelompok agama leluhur. Selain itu perlu diketahui bahwa istilah agama leluhur mencakup kelompok adat dan penghayat kepercayaan. Sedangkan pada penelitian ini, saya lebih berfokus pada penghayat kepercayaan yang ada di Tulungagung.

B. Politik sehari-hari

Para peneliti dari berbagai disiplin ilmu saat ini mengalami kekhawatiran mengenai tren yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Banyak orang yang menganggap kelompok yang dianggap tidak penting, seperti kelompok pinggiran, sebagai orang yang dianggap tidak berperan dalam proyek perkembangan kehidupan. Kelompok ini dianggap hanya menerima nasib saja, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengambil jalan individual daripada mengandalkan keberadaan kelompok untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap politik dan lembaga demokrasi. Namun, gerakan yang dilakukan oleh kelompok ini membuka peluang baru dengan memobilisasi berbagai suara frustrasi dan ketidaksetujuan yang dihadapi, seperti gelombang pemberontakan model baru yang menjanjikan.

Gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kadang mengalami keberhasilan, namun sering juga kehilangan momentum. Banyak aktivis dan peneliti yang mengalami kesulitan dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Beberapa pertanyaan yang sering dikemukakan adalah bagaimana cara individu beralih dari tuntutan dan protes ke aktivitas sehari-hari yang bisa berdampak pada perubahan. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan hal ini, seperti teori "*moments of madness*" yang menyatakan bahwa lembaga politik seringkali terlalu dominan dalam kehidupan masyarakat, sementara teori lain menyatakan bahwa saat ini segalanya mungkin terjadi.¹ dalam karyanya "*moments of madness*", bahwa lembaga politik dengan membabi-butakan merasuk ke semua aspek kehidupan. Sementara menurut Tarrow² menyatakan bahwa saat ini segalanya serba mungkin. Keadaan sulit yang harus dialami menyebabkan seseorang harus beralih dari berpura-pura untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan Morrill, Zald dan Rao menyatakan bahwa gerakan sosial berjalan dalam dua arah berbeda, menghapus berbagai lembaga yang telah ada dan menetapkan bentuk baru.³ Namun saat para anggota kelompok telah lelah, para pendukung mencair dan tekanan terhadap mereka semakin tinggi, realitas baru ini akan cenderung pudar saat tidak dikombinasikan, diadopsi dan dilembagakan dengan bentuk gerakan lama.

Saat ini, masyarakat hidup dalam era baru yaitu era media sosial seperti Youtube, Twitter, dan Facebook. Media tersebut dianggap efektif untuk berkomunikasi, menyebarkan ide, memobilisasi emosi, dan mengumpulkan massa.

¹ Zolberg, Aristide R. "Moments of madness." *Politics & Society* 2.2 (1972): 183-207.

² Tarrow, Sidney. "Cycles of collective action: Between moments of madness and the repertoire of contention." *Social science history* 17.2 (1993): 281-307.

Namun, keberadaan teknologi ini juga menimbulkan masalah baru seperti hilangnya interaksi langsung antar manusia. Oleh karena itu, pandangan skeptis terhadap perkembangan teknologi media sangatlah penting. Hal ini karena perlu dipertimbangkan dampak jangka panjang dari teknologi ini terhadap tujuan politik. Namun, kebiasaan lama seperti interaksi langsung, rencana yang sifatnya lokal, membangun keakraban, kedekatan dan keintiman masih sangat diperlukan untuk perubahan yang berkelanjutan.⁴

Saat ini perlu diperhatikan gerakan yang berfokus pada politik sehari-hari. Gerakan ini tidak selalu bersifat publik dan konfrontatif, seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang sepele seperti kegiatan sehari-hari juga dapat dianggap bersifat politis. Seperti yang dikemukakan oleh Lasswell bahwa politik adalah tentang siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Seperti kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap warga negaranya, meskipun ada yang setuju dan ada yang tidak, kelompok yang tidak setuju seringkali tidak menyatakan keberatannya secara terbuka. Namun, ketidaksetujuan atau keraguan mereka dapat dilihat dari tindakan atau keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu diperhatikan gerakan yang tidak selalu terlihat namun dapat memiliki dampak yang signifikan dalam perubahan politik. Gerakan-gerakan ini dapat dilihat dari tindakan sederhana seperti memilih untuk tidak membeli produk tertentu atau mengambil tindakan lokal untuk memperjuangkan hak-hak yang diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa gerakan sehari-hari ini juga memerlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang lebih luas untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Penelitian politik sehari-hari digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada petani dan partai komunis di Vietnam. Sejak awal, pengumpulan sumber daya di Vietnam menjadi permasalahan antara pemimpin nasional dengan penduduk desa di Delta Sungai Merah. Saat itu, perang melawan Prancis (1945-1954) dilakukan bukan hanya untuk kepentingan nasional tapi juga untuk revolusi sosialis dalam teknologi produksi. Setelah perang usai, partai komunis mulai melakukan revolusi di utara. Kemajuan program ini sangat tergantung pada penduduk Vietnam yang 80% hidup di pedesaan. Tanah yang ditinggalkan oleh pendudukan Perancis digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan Partai Sosialis. Proyek besar dilakukan dengan cara mendistribusikan tanah secara merata kepada semua orang, mengatur tanah di lokasi tertentu agar memiliki koperasi dan menggabungkan semua ladang dan sumber daya secara kolektif.⁵

Seperti halnya peraturan yang berlaku di negara komunis. Pemimpin nasional membenarkan hal itu, karena dengan pertanian kolektif secara signifikan akan meningkatkan produksi pertanian. Sebidang tanah yang diolah masing-masing rumah tangga di Vietnam, hal tersebut tidak mungkin berdampak banyak untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Pertanian kolektif akan membuat produksi jadi lebih efisien dan hasil panen melimpah sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk desa. Kerjasama semua penduduk desa juga dapat

⁴ Juris, Jeffrey S. "Reflections on# Occupy Everywhere: Social media, public space, and emerging logics of aggregation." *American ethnologist* 39.2 (2012): 259-279.

⁵ Kerkvliet, Benedict J. Tria. *The power of everyday politics*. Cornell University Press, 2018.

untuk merebut kembali tanah yang tidak dipakai, dapat membangun irigasi yang luas, berternak lebih banyak dan mengembangkan kegiatan nonpertanian.

Vietnam sebagai negara komunis, tanpa mengutamakan kolektivitas, beberapa orang bisa mendapatkan sebagian besar tanah, sehingga akan merusak idealitas soal kesetaraan sosial dan ekonomi. Bisa saja menyebabkan sebagian besar orang akan menjadi penyewa, buruh bergaji rendah dan pelayan orang kaya. Mengerjakan tanah secara kolektif akan membuat lahan tetap di tangan para penggarapnya, tidak dimiliki perseorangan tapi secara kelompok. Produk pertanian akan didistribusikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan setiap orang dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kelebihan nilai yang didapatkan dari pertanian kolektif akan digunakan untuk mendanai berbagai layanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya untuk kepentingan seluruh warga. Pertanian kolektif, menurut pemerintahan komunis Vietnam juga dapat mengubah pola pikir petani. Biasanya banyak orang yang hanya berfokus pada diri dan keluarganya sendiri, dengan pertanian kolektif, orang akan mulai lebih banyak bekerjasama, berbagai dan meningkatkan semangat kolektifnya. Kolektivitas juga sangat penting bagi aspek-aspek lain dari ekonomi politik sosialis.

Akhirnya, format tersebut mungkin juga khas di Negara Vietnam, bahwa kolektivitas merupakan bagian dari pertahanan Nasional. Negara di sokong oleh dua hal, pertama, petani yang diorganisir ke dalam koperasi kolektif dapat dengan mudah membentuk milisi lokal, kelompok gerilya, sebagai pasukan cadangan dan terutama untuk memperkuat pertahanan pasukan di utara dan secara nasional. Pertanian secara kolektif akan menghasilkan dorongan bagi petani di selatan untuk mengerahkan segala upaya dalam perjuangan melawan Amerika Serikat dan penyatuan tanah air Vietnam. Setelah pihak berwenang mengumumkan rencana pertanian kolektif pada tahun 1950-an, petani masih sibuk bekerja di lahan mereka sendiri. Seperti petani miskin di tempat lain petani ditempat ini hanya berfokus pada kecukupan makanan dan kebutuhan bagi keluarga mereka sendiri. Selain itu mereka juga berupaya untuk keluar dari kemiskinan. Bagi para petani ini, memiliki tanah milik mereka sendiri akan membantu hal tersebut terwujud. Untuk itu, reformasi pemerintahan komunis terhadap tanah mereka sangat mereka syukuri, meskipun gekolak tetap ada. Pemerintah Komunis Vietnam juga gencar upayanya dalam bidang literasi orang dewasa, sekolah pedesaan dan perpustakaan.

Meskipun memiliki kapasitas untuk menjalankan program pertanian kolektif tersebut, banyak penduduk desa Vietnam yang curiga dan meragukan program tersebut. Bukan soal kerjasamanya, tapi karena kerjasama itu total. Semua komponen untuk mendukung pertanian harus dikumpulkan, seperti tenaga, uang, hewan penarik. Hampir semuanya harus dikerjakan secara kolektif. Setelah itu, segala sesuatu yang diproduksi bersama akan dibagikan. Sedangkan penduduk desa, khususnya di Sungai Merah tidak pernah menjalankan pertanian dengan cara kerja seperti itu. Seandainya pertanian model seperti itu gagal, biayanya bisa sangat besar untuk masing-masing keluarga dan bahkan seluruh masyarakat. Hal itu juga disebabkan luasnya kemiskinan yang dialami petani, mengatur model pertanian baru, tapi tidak memiliki jaminan keberhasilan tentu menjadi hal yang menakutkan. Program tersebut, di mata para pemimpin negara mungkin hal yang baik, namun mereka tidak melihat kekhawatiran para petani. Mereka begitu saja dihadapkan

pada pilihan harus melayani keluarga, koperasi dan bangsa. Bahkan Uni Soviet di bawah Stalin juga tidak menerapkan hal seperti itu. Pemerintahan Vietnam tidak menekan para petani, atau menghukum mereka yang menolak program pertanian kolektif tersebut. Meskipun begitu, program pertanian kolektif tersebut pada akhirnya tetap runtuh.

Runtuhnya produksi pertanian yang ada di Vietnam, diakibatkan oleh rendahnya komitmen diantara penduduk desa, sehingga kembalian bagi pertanian kolektif menjadi sangat kecil. Karena secara teori para pemimpin bertanggungjawab kepada para petani, namun prakteknya hal itu tidak terjadi. Selain itu, otoritas tertinggi sering memberlakukan kebijakan yang merugikan, seperti pihak berwenang yang memerintahkan agar koperasi kecil bergabung untuk meningkatkan jumlah produksi. Hal lain yang terjadi, adanya penggelapan, pilih kasih dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat koperasi juga menjadi penyakit akut bagi program ini. Terutama masih adanya ketegangan yang belum terselesaikan antara keluarga dan organisasi. Organisasi perlu mengawasi banyak hal, mulai dari memantau hutan, sistem irigasi, atau sumberdaya lain yang dimiliki oleh anggota bersama dalam sistem kerja produksi yang terpisah. Banyaknya hal yang harus diawasi, sehingga organisasi membutuhkan lebih banyak kewaspadaan dan komitmen.

Komitmen ini juga penting, proses produksi yang cukup panjang, mulai dari menyisihkan hasil produksi sampai di setor ke pemerintah kemudian kembali lagi untuk biaya produksi. Di sisi lain para petani harus menanggung eksploitasi, dikarenakan harus mendapatkan penghasilan yang cukup bagi keluarga mereka sendiri. Mereka harus bekerja keras karena hubungan dengan pekerjaan dan hasil bagi keluarga mereka secara langsung. Sedangkan dalam pertanian kolektif dengan perantaraan banyak tangan, tidak ada hubungan antara pekerjaan yang membosankan dengan nilai yang bisa didapat, untuk satu orang atau rumah tangga manapun. Agar terjalin hubungan, harus ada yang memastikan agar tidak ada orang yang lalai memperbaiki jalan dan para pemimpin bertindak dengan benar. Sementara itu, petani anggota pertanian kolektif juga harus memastikan mendapatkan penghasilan yang cukup bagi keluarga mereka.

Meskipun masyarakat tidak setuju, namun hanya sesekali warga secara terbuka menentang para penguasa, pengurus koperasi, atau peraturan pemerintah. Di samping itu masyarakat lebih banyak menghindari sikap yang konfrontatif, dilakukan oleh masyarakat desa dengan sembunyi-sembunyi, tidak langsung dan berkelindan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan sehari-hari dan hal berkaitan dengan duniawi sering kali bersifat politis. Menggunakan definisi Harold Laswell bicara politik berarti bicara tentang siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana? Masyarakat ini menunjukkan ketidaksepakatan terhadap Pemerintahan Komunis yang terus menerus tentang alasan pemerintah Partai Komunis bagaimana tanah, tenaga kerja, pupuk, dan berbagai sumberdaya dalam kelompok harus digunakan dengan siapa dan untuk tujuan apa. Namun bagi lawan atau kelompok petani yang ragu, tidak secara langsung diungkapkan kepada para pendukungnya. Namun bentuk ketidaksetujuan itu terekspressi dalam hal yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Politik berpusat pada hal penting siapa

yang mendapatkan, seberapa proporsinya, kapan, bagaimana distribusi itu dilakukan dan atas dasar apa.

Suatu tindakan politik melibatkan tindakan, perdebatan, keputusan, konflik dan kerjasama oleh dan antar individu, kelompok dan organisasi berkenaan dengan alokasi, kontrol, dan penggunaan sumberdaya dan nilai yang mendasari aktivitas tersebut. Politik sehari-hari bertentangan dengan politik yang selama ini dipahami oleh banyak ilmuwan politik dan ilmuwan lainnya. Bahwa politik selama ini hanya dilihat sebagai segala kegiatan dalam pemerintahan dan upaya bersama untuk mempengaruhinya. Jika politik hanya dipahami seperti itu, berarti politik dimanapun hanya melibatkan sedikit sekali populasi di wilayah manapun, hanya dijalankan oleh pejabat pemerintah, partai politik, individu berpengaruh dan aktivitas dalam organisasi yang mencoba mempengaruhi otoritas dalam pemerintah.

Jumlah orang yang berpolitik di Vietnam, seperti contoh fenomena diatas, akan sangat kecil. Warga negara di Vietnam yang berbicara secara terbuka isu-isu publik sangat terbatas. Tindakan politik yang terbatas seperti itu kehilangan banyak hal yang signifikan secara politik. Karena distribusi sumber daya penting hanya terjadi terbatas pada pemerintah dan organisasi terkait. Hal tersebut hanya terjadi di seputar perusahaan, pabrik, universitas, keluarga, kelompok agama dan institusi lainnya. Pemahaman politik juga tidak terbatas hanya pada segala kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi otoritas atau proses untuk mengalokasikan sumberdaya. Bahkan orang sesungguhnya juga tidak perlu secara terorganisir dan aktif di depan umum untuk bisa berpolitik.⁶

Agar memahami lebih banyak soal politik, kita harus bisa membedakan dalam tiga makna, politik resmi, advokasi dan sehari-hari. Berbicara politik resmi, hal ini berarti berkaitan dengan otoritas di pemerintahan atau organisasi lain yang menentang, membuat dan menerapkan, bahkan mengubah atau menghindari kebijakan mengenai alokasi sumberdaya. Kegiatan ini bisa bersifat formal maupun tidak dan ilegal. Berikutnya ada yang disebut sebagai politik advokasi, politik yang bertindak secara langsung dan konfrontatif untuk mendukung, mengkritik, menentang otoritas, kebijakan, program dan seluruh cara untuk mengendalikan bagaimana sumberdaya diproduksi dan didistribusikan. Politik semacam ini bisa bertindak secara ramah, damai, hingga sampai bertindak bermusuhan, memberontak dan melakukan kekerasan. Politik Advokasi bisa dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau suatu organisasi. Sedangkan politik yang jarang menjadi perhatian kebanyakan orang, politik sehari-hari, terjadi di tempat orang bekerja dan melibatkan orang yang menganut, menentang, menyesuaikan diri atau menentang norma dan aturan terhadap otoritas produksi, dan alokasi sumberdaya.⁷

Politik sehari-hari yang harus dipahami bahwa politik sehari-hari menyampaikan bahwa orang dari dan penilaian dari sistem tempat mereka tinggal. Misalnya politik sehari-hari yang dilakukan oleh para petani di Vietnam. Berbagai kegiatan seperti menanam, memupuk, membajak sawah, memelihara ternak,

⁶ Piven, Frances Fox, and Richard Cloward. *Poor people's movements: Why they succeed, how they fail*. Vintage, 2012. Hal. 4-5.

⁷ Tria Kerkvliet, Benedict J. "Everyday politics in peasant societies (and ours)." *The journal of peasant studies* 36.1 (2009): 227-243.

berbagai hal itu adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan petani. Bila hal itu dikontekskan dengan pertanian kolektif, berbagai pekerjaan yang dilakukan seringkali mengungkapkan pandangan mereka tentang produksi dan distribusi, koperasi yang diikuti dan otoritas yang bertanggungjawab. Seorang petani yang rajin melakukan pekerjaannya, mungkin hal itu dilakukan untuk mendukung sistem. Bisa saja seseorang yang rajin pekerja hanya untuk mengesankan orang lain dan bukan bentuk penentangan terhadap sistem yang tidak dia setujui. Namun bila kita mengabaikan berbagai aktivitas tersebut, terutama bila aktivitas itu masif dilakukan, kita akan kehilangan banyak dimensi yang patut dicermati, seperti adanya negosiasi, dan memperdebatkan berbagai distribusi, produksi, penggunaan, dan pengendalian sumberdaya.

Politik sehari-hari juga dapat mempengaruhi bentuk politik lainnya. Politik ini juga bisa dimasukkan dalam bentuk politik advokasi, sebab bertujuan untuk mempengaruhi otoritas dan wacana publik pada produksi dan alokasi sumberdaya. Bila merujuk pada fenomena yang ada pada petani di Vietnam, tidak ada gerakan politik advokasi yang dilakukan untuk merubah atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap program yang jalankan oleh pemerintah. Satu-satunya bentuk advokasi yang dilakukan oleh para petani terkadang dalam bentuk ketidaksetujuan dan frustrasi melalui perilaku sehari-hari. Bagaimanapun juga model politik seperti ini bisa mempengaruhi politik resmi, entah diniatkan atau tidak. Bahwa perilaku sehari-hari bisa melanggengkan suatu kekuasaan atau kebijakan. Intinya kegiatan sehari-hari dapat merubah kebijakan atau keruntuhan suatu organisasi. Mungkin dampaknya kecil, tapi jika tersebar luas, bahkan dapat berimplikasi secara nasional.

Bagaimana tindakan sehari-hari bisa mempengaruhi politik lebih besar, mari kita lihat lagi kasus yang terjadi Vietnam. Jelas sekali bahwa secara tidak sadar para petani mempengaruhi program pemerintah tentang pertanian kolektif. Tapi di lapangan lebih sering yang tampak adalah bahwa tiap orang banyak mengklaim kepemilikan tanah, kerja mereka sendiri, dan sumber daya lainnya untuk menghidupi keluarga mereka atau karena minim kepercayaan terhadap keberadaan koperasi. Berbagai tindakan petani tersebut, selain pernyataan dari petani bagaimana sumberdaya itu harus digunakan, sedikit demi sedikit merusak keberadaan koperasi, mempengaruhi otoritas dan berkontribusi pada keputusan pemerintah perihal pertanian kolektif.

Pemaksaan yang terjadi di Vietman, dalam derajat tertentu sama dengan kasus Pengagamaan di Indonesia. Sebab hal ini dilakukan dengan memaksakan agama kepada semua warganya. Sesuatu yang telah terlembagakan sejak masa kemerdekaan. Terutama mereka yang dipaksa ini memiliki berbagai label dan stigma sejak masa kolonial.⁸ Perkembangan terbaru pengakuan bagi kelompok ini dengan dikategorikan sebagai penganut agama leluhur. Selain itu sebagai warga negara mereka selama ini juga menuntut agar segala haknya dipenuhi oleh negara. Sebab sepanjang sejarah, mereka dipaksa untuk mengidentifikasi diri, bersumpah, menikah, dengan agama yang diakui oleh negara yang sesungguhnya tidak mereka

⁸ Ma'arif, Samsul. Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia. CRCS UGM, 2017.

yakini. Mereka adalah warga negara yang selama ini mendapatkan diskriminasi atas nama agama atau politik agama.

Politik agama merupakan upaya menggunakan agama sebagai alat kuasa dan kontrol terhadap warga negara lain.⁹ Upaya politik ini bisa dilakukan melalui tekanan massa, kekuatan partai politik, hingga masuk kedalam negara melalui berbagai kebijakan dan perundang-undangan. Politik agama menempatkan agama memiliki definisi eksklusif berdasarkan perspektif agama tertentu dan hanya mengakomodasi sebagian warga negara, tapi dijadikan secara paksa bagi identitas semua warga negara. Sedangkan sebagai kebijakan menjadi dasar untuk menentukan kelompok mana yang beragama dan tidak/belum beragama. Kelompok yang agamanya bisa menyesuaikan dengan kebijakan soal agama tersebut, agamanya resmi dan diakui oleh negara dan diakui menjadi warga negara. Bagi agama yang tidak dapat menyesuaikan dengan standart tersebut, tidak dapat mendapatkan hak warga negaranya. Mereka ini salah satunya adalah kelompok yang menganut agama leluhur.

Penganut agama leluhur inilah kelompok yang dari waktu ke waktu agama atau keyakinannya terus menjadi sasaran pemaknaan, pemahaman yang terus berubah-ubah. Agama/kepercayaan mereka dianggap masih animis dan terbelakang. Selanjutnya, agama mereka juga dianggap sebagai kebudayaan sehingga perlu dikembangkan. Sedangkan para penganutnya digolongkan sebagai komunis, karena dianggap tidak beragama. Pernah di suatu masa, karena masih tersedianya ruang negosiasi bagi kelompok penganut agama ini, mereka dapat sejajar dengan agama yang diakui negara. Namun, pemaknaan atas mereka terus berubah hingga sekarang.¹⁰

Sejak era reformasi para penganut agama selain agama resmi dikenal dengan istilah agama leluhur. Meskipun begitu, istilah ini sering dipertukarkan dengan istilah lain, seperti agama asli, agama lokal, agama nusantara, dan diidentikan sebagai kearifan lokal. Sedangkan penghayat kepercayaan yang saya maksud disini termasuk sebagai agama leluhur. Terutama berbagai praktek yang dimasukan sebagai praktek animis, budaya, adat dalam wacana dan literatur. Mereka biasa mempraktekan semedi, bersih desa, pergi ke gunung, sesajen, dlsb. Sebagaimana agama dunia, agama leluhur juga memiliki penganutnya sendiri. Namun dalam tulisan ini saya berfokus pada penghayat kepercayaan.

Seperti paparan Samsul Ma'arif dalam bukunya "*Pasang Surut Rekognisi Agama Leluher dalam Politik Agama di Indonesia*," politik agama yang terjadi hari ini adalah hasil dari kontestasi sejak zaman Belanda. Hal ini terjadi karena pembedaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Belanda terhadap masyarakat jajahannya dan persaingan sosial di masyarakat itu sendiri. Dua peristiwa yang menjadi dasar politik agama adalah adanya pertentangan Islam vs Adat dengan kontestasi Santri dan Abangan. Pertentangan terus berlanjut hingga konstitusi

⁹ Picard, Michel, and Rémy Madinier, eds. *The politics of Religion in Indonesia: Syncretism, orthodoxy, and religious contention in Java and Bali*. Vol. 33. Routledge, 2011.

¹⁰ Ma'arif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluher dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS UGM, 2017. Hal.6.

negara di rumuskan. Hingga sampai pada proses “agama dan kepercayaan” dimasukkan dalam konstitusi atau UUD 45.

Di level masyarakat antara “agama dan adat” sering dipertentangkan. Kadang keduanya juga dianggap sama atau tidak ada pertentangan diantara keduanya. Berdasarkan catatan Clifford Geertz hal ini disebabkan makin menguatnya komunitas agama yang berorientasi pada agama modern, ortodoks dan puritan yang menganggap bahwa adat mencemari agama. Berbeda dengan agama yang berorientasi pada keagamaan tradisional-konteksualis yang menempatkan ada sebagai pengayaan agama. Selama adat tidak bertentangan dengan prinsip agama, seperti soal keesaan Tuhan, keberadaan adat menjadi bagian yang memperkaya keberagaman.

Di level sosial masyarakat menguatnya kelompok puritan disebabkan oleh Kanal Suez pada tahun 1869 yang mengakibatkan semakin mudahnya akses transportasi antara Jawa ke Mekkah. Mengacu pada catatan Clifford Geertz adanya peningkatan terus menerus jemaah haji yang pergi ke Mekkah. Peningkatan ini terus menerus dari tahun ke tahun, seperti yang dapat dilihat, pada tahun 1860 hanya sekitar 2000 jemaah haji, tahun 1880 meningkat lagi sebanyak 10.000 jemaah haji, dan pada tahun 1926 menjadi 50.000. Para alumni jemaah haji ini melahirkan kelas elite baru di sosial masyarakat Indonesia.¹¹ Mereka yang pergi berhaji tidak semata-mata hanya pergi ke Mekkah untuk menjalankan rukun Islam, tapi mereka juga belajar agama di pusat Islam. Namun di sisi lain saat itu, ide soal pemurnian dan reformasi Islam terutama dari kelompok Wahabisme sedang menguat.

Terutama ide tentang pemurnian dan reformasi inilah yang selanjutnya ikut terbawa pulang ke tanah Jawa. Sekembalinya dari Mekkah mereka mendirikan sekolah yang dikenal sebagai madrasah atau Sekolah Islam dan menjadi pemimpin agama di komunitasnya.¹² Pemurnian atau Reformasi Islam berasal dari kelas baru alumni haji dan selanjutnya menjadi pendiri dari Muhammadiyah pada tahun 1912. Tahun itu juga sekaligus menandai sebagai tahun bangkitnya gerakan pemurnian Islam. Yayasan ini berdasarkan catatan Clifford Geertz, membangkitkan persebaran ortodoksi di desa-desa dan kota-kota. Sejak saat itu, kelompok-kelompok semacam ini mulai memerangi segala hal yang dianggap mengotori kesucian agama Islam.¹³ Di level masyarakat, konflik agama sinkretis dengan ortodoksi tidak dapat terhindarkan.

Berbagai keragaman persepsi tentang agama tersebut merupakan hal yang biasa di kala itu, tapi di tingkat pemerintahan Belanda, atas saran Christian Snouck Hurgronje sebagai penasehat pemerintahan Hindia Belanda, mengeluarkan kebijakan untuk membedakan antara Islam dengan Adat. Kebijakan ini menyatakan bahwa Islam politik dilarang, Islam kesalehan dibebaskan, dan adat dikuatkan, direvitalisasi dan dilembagakan.¹⁴ Tentu saja kebijakan ini bertujuan untuk

¹¹ Geertz, Clifford. *Islam observed: Religious development in Morocco and Indonesia*. Vol. 37. University of Chicago press, 1971. Hal. 67.

¹² Geertz 1976: 133–7

¹³ Geertz, 1976: 126

¹⁴ Benda, Harry J. "Christiaan Snouck Hurgronje and the foundations of Dutch Islamic policy in Indonesia." *The Journal of Modern History* 30.4 (1958): 338-347.

mengatasi pemberontakan oleh militan Islam pada saat itu dengan menjadikan kelompok adat sebagai koalisi.

Kebijakan Belanda ini mempolarisasi masyarakat jajahan pada saat itu. Melalui kebijakan ini juga Belanda berhasil melembagakan perbedaan antara adat dan agama. Di tataran masyarakat sendiri kelompok agama atau Islam menganggap kelompok adat sebagai musuh, karena bekerjasama dengan Pemerintah Belanda. Bersamaan dengan itu, Belanda juga menerapkan kebijakan politik etis bagi masyarakat jajahan, dengan memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat jajahan.

Keberadaan kebijakan politik etis ini sendiri menimbulkan dilema bagi Pemerintah Belanda. Sebab dalam pandangan Belanda, adat yang telah dilembagakan tersebut dipahami sebagai sesuatu keyakinan yang sifatnya *animisme*, bukan agama, antikemajuan dan ant-Eropa. Pemahaman ini tentu saja datang dari para ilmuwan penjajah dan dari para misionaris.¹⁵ Pendidikan kemudian yang dijadikan sarana implemmentasi bagi kebijakan tersebut. Belanda kemudian bekerjasama dengan pihak Gereja. Pendidikan Kristen diadopsi menjadi pendidikan pemerintah, sementara pendidikan Islam dilarang. Kebijakan politik etis tersebut juga berdampak pada revitalisasi Adat, dimaknai sebagai mengkristenkan dan memodernkannya.

Selain itu, Pemerintah Belanda terkait politik etis, pemerintah dituntut untuk mengakui hukum yang hidup di masyarakat jajahan. Penelitian hukum ini kemudian oleh Van Vollenhoven, murid dari C. S. Hurgronje. Berbagai hukum adat yang memiliki kosekuensi didokumentasikan. Hasilnya karena kebijakan ini, adat hanya dilihat sebagai sebatas hukum saja. Hal itu juga menambah semakin terpinggirkannya adat sebagai agama.¹⁶ Pandangan berbeda pemerintah Belanda sampai menghasilkan berbagai kebijakan yang mempolarisasi masyarakat. Hasil akhirnya di masyarakat jajahan sendiri semakin mengokohkan pandangan secara politik, bahwa adat adalah lawan Islam.

Pada abad 20 polarisasi ini semakin menguat disebabkan hadirnya kesadaran baru terhadap penjajahan Belanda. Kesadaran ini terlembagakan dengan terbentuknya berbagai perkumpulan politik. Berbagai perkumpulan politik seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, PNI dan Partai Komunis. Perkumpulan politik ini menjadi komponen penting pengentalan polarisasi dalam masyarakat yang dinamakan sebagai politik aliran. Politik aliran terutama di Jawa didasarkan pada analisis Clifford Geertz yang terdiri dari trikotomi, abangan, santri, priyayi. Trikotomi Clifford Geertz tersebut diasosiasikan oleh empat partai politik, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai wakil kelompok priyayi, Partai Komunis Indonesia (PKI) wakil dari kelompok abangan, dan Santri di wakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Setelah kekuasaan berpindah ke tangan Jepang, kelompok abangan seakan tenggelam,

¹⁵ Kruyt, Albertus C. "The Presentation of Christianity to Primitive Peoples: The Toradja Tribes of Central Celebes." *International Review of Mission* 4.1 (1915): 81-95.

¹⁶ Fasseur, Cees. "Colonial dilemma: Van Vollenhoven and the struggle between adat law and Western law in Indonesia." *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*. Routledge, 2007. 70-87.

karena Pemerintahan Jepang bekerjasama dengan kelompok Islam untuk melawan Belanda.

Ketegangan ini hadir kembali pada saat masa persiapan kemerdekaan, terutama untuk merumuskan fondasi negara Indonesia. Pada masa itu kelompok-kelompok secara sederhana dibagi menjadi dua, santri dan abangan. Di sisi santri mendukung negara Islam sebagai bentuk negara, sedangkan, kelompok abangan mengusulkan negara sekuler. Kelompok santri berpendapat bahwa antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kelompok abangan, bersikap netral, bahwa agama adalah urusan pribadi.

Setelah proklamasi kelompok santri masih memperjuangkan piagam Jakarta sebagai pondasi negara Islam, namun pada akhirnya gagal. Kegagalan itu digantikan dengan keberhasilan memasukan “agama” dalam konstitusi 1945. Selain itu juga dibentuk Departemen Agama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terhadap umat Islam yang dianggap sebagai mayoritas. Setelah itu undang-undang pernikahan dibuat untuk menggantikan UU warisan Belanda. Menurut Katz dan Katz UU tersebut sesungguhnya hanya untuk menegaskan peran Departemen Agama dalam melayani umat Islam.

Selain itu keberadaan Departemen agama menjadi bukti nyata bahwa kelompok santri telah berhasil menginfiltrasi negara. Depag menjadi alat politik untuk terus menekan kelompok abangan, termasuk kelompok kebatinan. Hal yang dilakukan seperti mengajukan definisi agama. Definisi tersebut bersifat sangat sempit dan sektarian. Definisi tersebut juga ditujukan untuk menutup peluang kelompok abangan diakui sebagai agama. Meskipun mendapatkan penolakan dan tidak pernah tercatat dalam dokumen negara, namun hal itu selanjutnya efektif untuk sebagai standar kelompok mana yang disebut agama dan tidak. Definisi agama tersebut seperti batas bagi yang bukan agama dan begitu pula dengan kepercayaan yang tidak dapat diperlakukan seperti agama.

Sedangkan di sisi lain, mereka yang dianggap bukan agama, khususnya kebatinan mengkonsolidasikan diri. Sehingga saat itu banyak bermunculan berbagai organisasi dan perkumpulan, seperti Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) pada 20 Mei 1949 dan setelah itu menyusul kelompok kebatinan yang lain. Suatu saat berbagai kelompok tersebut melebur dalam satu wadah bernama Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro. Berbagai perkembangan ini tentu saja meresahkan kelompok santri. Keberadaan mereka dianggap dapat melahirkan agama baru dan mengancam dan dianggap dapat membahayakan masyarakat dan negara sehingga perlu diawasi. Maka setelah itu dibentuklah lembaga khusus, Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada tahun 1953. Lembaga ini semacam “anjing pengintai” Departemen Agama.

Kemudian 1955 pemilu untuk pertama kalinya diadakan. Keadaan ini menjadi momen bagi pengentalan kembali polarisasi santri vs abangan.¹⁷ Tentu saja berkaitan dengan pemilu hadir wacana publik, tentang siapa yang bakal memenangkan pemilu, abangan atau santri? Terutama PKI saat itu sangat agresif dan berhasil mengambil hati rakyat, khususnya kelompok abangan. Terus masuk ke

¹⁷ Ricklefs, Merle Calvin. Mengislamkan Jawa. Serambi Ilmu Semesta, 2013. Hal. 91.

berbagai wilayah basis-basis abangan.¹⁸ PKI dan PNI mempergunakan berbagai kesenian sebagai sarana politik, seperti reog, ludruk, dlsb. Sedangkan NU mempergunakan Rebana dan Hadrah. Sebelum pemilu 1955 percekcohan, hoax, ancaman dan fitnah berkembang. Kedua kelompok khawatir, jika salah satu dari mereka menang, akan mendapatkan persekusi. Hal itu membangkitkan trauma 1948, selanjutnya secara simplistik, siapapun yang bukan santri diasosiasikan dengan abangan.¹⁹

Setelah hasil pemilu menunjukkan kemenangan bagi kelompok abangan dengan mendapatkan 59% suara dengan rincian PKI 27% dan PNI 32%, sedangkan NU mendapatkan 42% dan Masyumi 12% suara.²⁰ Kemenangan politik bagi abangan tersebut menjadi momen penting bagi kebatinan untuk memperoleh dukungan politik bagi pengembangan kelompok dan organisasinya. Segera setelah itu, tepatnya pada tanggal 19-21 Desember 1955, mengadakan kongres Nasional kebatinan di Semarang. Di Kongres inilah terbentuk Badan Kongres Kebatinan Nasional (BKKI) dan memilih Mr. Wongsonegoro sebagai ketua. Hasil kongres memberi rekomendasi melalui falsafah Jawa, *sepi ing pamrih rame ing gawe, memayu hayuning bawana*.²¹ Kongres inilah menjadi awal dikenalnya kelompok ini sebagai "aliran kebatinan."

Perkembangan kelompok kebatinan tentu saja menyita perhatian Departemen Agama. Depag merasa perkembangan tersebut sebagai ancaman nyata. Demi menghadapi tekanan dari Depag, pada kongres kedua 17-19 Agustus 1956, kelompok kebatinan memformulasikan kebatinan sebagai prinsip dan sumber azas sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mencapai budi luhur dan guna kesempurnaan hidup. Kelompok kebatinan juga menyatakan diri bukan dan tidak menjadi agama baru, tapi hanya untuk meningkatkan kualitas keagamaan.²² Mencoba untuk terus melepaskan diri dari tekanan Depag, pada tahun 1957 BKKI menyurati presiden Sukarno untuk mengakui kebatinan setara dengan agama dan mengusulkan 5 perwakilan mereka sebagai anggota dewan nasional.²³

Tekanan terus berlanjut bagi kelompok kebatinan. Drama perjuangan Kebatinan menghadapi tekanan dari kelompok Islam terus berlanjut, terutama dari Departemen Agama dan Pemuda Islam Indonesia. Bagi Depag mereka harus memenuhi kriteria sebagai agama, sedangkan Pemuda Islam Indonesia menggunakan stigma negatif praktek klenik yang dijalankan oleh kebatinan. Selanjutnya, pada kongres III kebatinan 17-20 Juli 1957, presiden Sukarno memberikan sambutan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah organisasi dan Kehidupan. Selain itu juga mengingatkan agar berhati-hati dengan

¹⁸ Ricklefs, Merle Calvin. Mengislamkan Jawa. Serambi Ilmu Semesta, 2013. Hal. 90.

¹⁹ Ricklefs, Merle Calvin. Mengislamkan Jawa. Serambi Ilmu Semesta, 2013. Hal. 93.

²⁰ Ricklefs, Merle Calvin. Mengislamkan Jawa. Serambi Ilmu Semesta, 2013. Hal. 84.

²¹ Arroisi, Jarman. "ALIRAN KEPERCAYAAN & KEBATINAN: Membaca Tradisi dan Budaya Sinkretis Masyarakat Jawa." (2015).

²² Subagya, Rachmat. Agama Asli Indonesia. Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981. Dwiyanto, Djoko. "Penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Daerah Istimewa Yogyakarta." Yogyakarta: Pararton (2010).

²³ Patty, Samuel Agustinus. "Aliran Kepercayaan": A Socio-religious Movement in Indonesia. Diss. Washington State University, 1986. Hal. 70.

klenik. Kongres kebatinan menyatakan bahwa ajaran mereka bukan klenik, hanya aktivitas spiritual murni.²⁴ Pergulatan wacana antara agama vs kebatinan terekam dalam rumusan TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 yang ditetapkan di kota Bandung pada tanggal 3 Desember 1960.

C. Berbagai Bentuk Perlawanan

Pendekatan politik yang berkelindan dengan kehidupan sehari-hari bertujuan untuk memberi tanggapan dan berupaya dipertemukan dengan upaya baru dari para sarjana yang tertarik untuk memperluas pemahaman tentang perlawanan²⁵. Sedangkan menurut Courpasson, tampaknya suatu perlawanan telah mengambil alih politik mendasar di luar ekosistem politik selama ini.²⁶ Literatur yang ada selama ini bertujuan untuk menganalisis berbagai proses masalah "keadilan sosial dan ketidakadilan sosial"²⁷. Utamanya sekarang ini banyak yang tertarik pada berbagai upaya yang dilakukan oleh individu yang dianggap tidak berdaya.

Kelompok yang tidak berdaya, setelah menghadapi berbagai bentuk masalah secara lokal dan menghadapi berbagai tekanan, kemudian menciptakan berupaya menciptakan banyak bentuk baru perlawanan, bisa berupa lingkungan kebersamaan dan solidaritas bersifat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup, menciptakan identitas kolektif bersama dan menormalkan ruang. Aktivitas politik sehari-hari ini memperluas pemahaman kita tentang bagaimana mereka yang hidup dipinggiran, sebenarnya dapat terlibat dalam perlawanan yang berarti. Mereka bergerak untuk menawarkan wawasan baru tentang aktivitas politik bagi mereka yang dianggap tidak berdaya dan dapat melampaui politik serikat pekerja dan partai politik yang dilembagakan untuk menawarkan wawasan baru

Tanpa kekuatan memadai, yang tidak berdaya bisa memiliki alat perlawanan. Seperti berbagai penelitian yang dilakukan oleh James C Scott telah menyumbangkan laporan terperinci tentang penolakan kelompok tidak berdaya untuk menerima subordinasi. Hal itu dapat disebut sebagai Politik yang lemah atau infrapolitik, politik sudut-sudut. Politik ini dilakukan dengan mengelak dan sangat hati-hati. Terutama bertujuan untuk menghindari konflik terbuka yang membawa risiko berbahaya. Infrapolitik bisa berwujud berbagai tindakan kecil, seperti pembunuhan karakter, pencurian kecil-kecilan, pemboikatan sosial terhadap pesta kaum elit, gosip dan rumor, ancaman yang tidak jelas, sabotase kecil.²⁸ Namun tindakan tersebut tidak terkoordinasi dengan jelas, tapi diikuti dan diterima secara diam-diam sebagai norma, sebagai bagian kecil dari konflik dan perjuangan kelas.

²⁴ Patty, Samuel Agustinus. "Aliran Kepercayaan": A Socio-religious Movement in Indonesia. Diss. Washington State University, 1986.

²⁵ Mumby, Dennis K. "Theorizing resistance in organization studies: A dialectical approach." *Management communication quarterly* 19.1 (2005): 19-44.

²⁶ Courpasson, David, and Steven Vallas, eds. *The Sage handbook of resistance*. Sage, 2016.

²⁷ Martin de Holan, Pablo. "Editor's Introduction: The process of crafting resistance." *Journal of Management Inquiry* 25.1 (2016): 93-95.

²⁸ Scott, James C. *Decoding subaltern politics: Ideology, disguise, and resistance in agrarian politics*. Routledge, 2012.

Selain itu, bagi para penguasa penguasa memilih untuk menerima dan mengabaikan, dibanding menekan berbagai ancaman tersebut dan menjadikannya konflik terbuka. Oleh sebab itu, konflik semacam ini menjadi semacam politik dunia bawah tanah yang hampir tidak meninggalkan jejak dalam catatan publik". Sekali lagi bahwa infrapolitik adalah bentuk politik sehari-hari yang berlaku di negara yang warganya kehilangan haknya.

Infrapolitik bersifat tidak beraturan, terutama berkaitan dengan kondisi materiil pihak tertindas. Akibatnya, kasus-kasus yang termasuk infrapolitik dapat menghilangkan penegasan diri, dilakukan oleh orang yang harkat dan martabat tertindas, dan tersubordinasi. Seperti halnya Scott yang menyatakan bahwa Perang Saudara Amerika merupakan pembelotan besar-besaran tentara Konfederasi. Pembelotan ini tidak pernah terkoordinasi tetapi hanya dilakukan secara massal oleh orang-orang yang tidak tertarik berperang.²⁹ Terutama Melalui karya Scott kita bisa mengidentifikasi syarat terjadinya infrapolitik, adanya anonimitas dan ambiguitas. Istilah anonimitas untuk menyebut gerakan ini yang muncul dalam bayang-bayang, bebas dari pandangan penguasa, dan tidak terjadi kontestasi perilaku. Sedangkan sebagai keadaan ambiguitas, sebab bisa tampak seperti humor, atau pidato keagamaan, hal itu sesungguhnya hanya digunakan untuk menyembunyikan maksud sebenarnya. Karena keadaan mereka yang harus menghadapi penguasa yang bisa saja menggunakan bentuk kekerasan dan kekuatan untuk menertibkan segala konflik. Sehingga jalan utama yang bisa ditempuh adalah dengan menggunakan ketenangan untuk menghadapi rezim totaliter. James C Scott juga menegaskan bahwa perwujudan infrapolitik dan gerakan tersembunyi bukanlah gagasan ramscian soal hegemoni dan kurangnya kesadaran kelas. Keadaan yang mencegah seseorang untuk mencoba sesuatu yang berbeda, tetapi semacam ketidakmampuan untuk bertindak bersama.

Menampakan sikap apatis ini dikonfirmasi oleh para peneliti gerakan sosial yang mengamati kesulitan yang dihadapi gerakan untuk mempertahankan perubahan untuk jangka panjang.³⁰ Memang, mengikuti "momen-momen keranjingan dan memiliki karakteristik emosi tinggi dari awal-awal gerakan protes, kemudian gerakan sosial cenderung menurun.³¹ Sedangkan para peneliti lebih sering berfokus memeriksa mobilisasi dan caranya gerakan sosial muncul, beberapa studi menjelaskan mengapa kebanyakan dari mereka akhirnya menurun.³² Di antara penjelasan yang bisa kita lacak, disebutkan oleh Gamson³³ yang berfokus pada habisnya sumber daya. Sedangkan menurut Piven dan Cloward³⁴ keadaan

²⁹ Scott, James C. *Weapons of the Weak*. Yale University Press, 2008.

³⁰ Juris, Jeffrey S. "Reflections on # Occupy Everywhere: Social media, public space, and emerging logics of aggregation." *American ethnologist* 39.2 (2012): 259-279.

³¹ Zolberg, Aristide R. "Moments of madness." *Politics & Society* 2.2 (1972): 183-207.

³² Kamenitsa, Lynn. "The process of political marginalization: East German social movements after the wall." *Comparative Politics* (1998): 313-333.

³³ Gamson, Joshua. "Rubber wars: Struggles over the condom in the United States." *Journal of the History of Sexuality* 1.2 (1990): 262-282.

³⁴ Cloward, Richard A., and Frances Fox Piven. "Hidden protest: The channeling of female innovation and resistance." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 4.4 (1979): 651-669.

tersebut dihubungkan dengan melemahnya aktivisme yang dilakukan melalui kerja organisasi.³⁵ Menurut McAdam hal itu disebabkan hilangnya dukungan akar rumput.³⁶ Selanjutnya Van der Veen dan Klandermans menghubungkan penurunan gerakan sosial terjadi karena penurunan partisipasi anggota. Sejumlah besar individu saat ini tampaknya hanya menerima nasib mereka atau mencoba mengubahnya melalui upaya individu saja, bukan lagi melalui aksi kolektif.

Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa literatur yang menyoroti perkembangan teknologi media dan gerakan sosial. Perkembangan media komunikasi, berupa situs web, telepon selular alat jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook, menawarkan peluang tiada banding untuk memobilisasi orang dalam jaringan perlawanan yang sebagian besar terdesentralisasi. Sedangkan orang optimis terhadap keadaan sebelum kemajuan teknologi saat ini, memperdebatkan pentingnya interaksi tatap muka untuk memahami dinamika gerakan protes. Namun seperti halnya pernyataan Juris, bahwa perdebatan antara kelompok yang optimis dan skeptis terhadap teknologi media sesungguhnya tidak penting untuk dipersoalkan. Karena sesungguhnya teknologi media dapat memengaruhi gerakan terorganisir, sementara tempat, tubuh, dan cerita sosial terus berlanjut.

Sebelumnya kita harus melihat bagaimana politik selama ini dipahami. Politik lebih sering atau mungkin selalu, diasosiasikan oleh praktek yang dilakukan oleh para profesional dan bersifat formal. Padahal secara harfiah politik berasal dari bahasa Yunani, politika adalah segala urusan yang diasosiasikan dengan membuat keputusan dalam suatu kelompok atau hubungan kekuasaan diantara individu, semacam distribusi sumberdaya dan status. Sayangnya selama ini kegiatan politik hanya bisa dilakukan oleh orang yang terpelajar dan hanya oleh para elite politik. Sehingga kekurangan pendekatan semacam ini hanya melihat proses-proses besar dalam pelaksanaan politik, terfokus pada Lembaga Pemerintahan, Berbagai organisasi Formal, Pemilu, dlsb.

Padahal segalanya bisa dikaitkan sebagai kegiatan politik, bahkan tindakan kita dalam sehari-hari. Mari sebelumnya merujuk kembali makna harfiah politics, dimaknai sebagai segala urusan yang diasosiasikan dengan membuat keputusan dalam suatu kelompok atau hubungan kekuasaan diantara individu, semacam distribusi sumberdaya dan status. Namun tidak demikian dengan pendekatan politik konvensional, sudut pandang yang dipakai selalu berkisar lembaga dan organisasi formal, pemerintahan, pemilu dan berbagai praktek elit penguasa.

Selain itu, pendekatan politik konvensional selama ini memiliki keterbatasan, sebab hanya melihat perilaku pemerintahan, birokrasi dan lembaga publik lainnya. Berbeda dengan politik sehari-hari, lebih luas karena melibatkan orang-orang yang menganut, mematuhi, menyesuaikan, dan mempertentangkan norma dan peraturan berkenaan dengan otoritas, produksi, alokasi sumberdaya, dan melakukan semua itu dalam keadaan ekspresi yang tenang, biasa, halus, jarang diatur dan diarahkan.

³⁵ Cloward, Richard A., and Frances Fox Piven. "Hidden protest: The channeling of female innovation and resistance." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 4.4 (1979): 651-669.

³⁶ McAdam, Doug. "Cognitive liberation." *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (2013).

Berbeda dengan berbagai macam praktek politik formal, keberadaan politik sehari-hari hanya melibatkan sesuatu yang kecil dan tanpa organisasi.

Pendekatan untuk memahami politik sehari-hari bisa sangat jauh berbeda, seperti membalik paradigma selama ini soal politik lembaga dan politik advokasi. Politik sehari-hari ada tapi tidak tampak, menjadi perilaku tapi tidak ingin seseorang perilakunya disebut sebagai politik. Politik sehari-hari bisa saja berlaku dalam suatu organisasi, namun sesungguhnya perilaku tersebut tidak terorganisir.³⁷ Politik sehari-hari bisa terjadi dimana saja, di lingkungan seseorang tinggal, bisa saja tempat seseorang bekerja. Politik ini terjalin berkelindan dalam aktivitas keseharian seseorang, disaat mencari nafkah, bergulutan manusia dengan permasalahan sehari-hari, berbagai interaksi antara atasan dengan bawahan. Politik ini juga mencakup praktek produksi dan distribusi sumberdaya dalam lingkup di rumah tangga, berbagai komunitas kecil yang jauh dari campur tangan organisasi formal.

Bila kita mau menelisik makna awal politik, berasal dari bahasa Yunani, politikos yang bermakna warga negara. Berdasarkan makna harfiah tersebut, sehingga politik dapat dilihat sebagai aktivitas amatiran bukan kerja profesional. Seperti Aristoteles yang berpendapat bahwa politik melibatkan negosiasi dunia plural, berbagai orang dengan pandangan berbeda, kepentingan, latarbelakang yang berinteraksi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Bisa dibilang bahwa politik adalah lawan dari relasi yang didasarkan pada kesamaan. Berkaitan dengan kesamaan Aristoteles mencontohkan aliansi militer dan aliansi keluarga, dimana aliansi-aliansi ini merupakan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan hanya dilingkarannya saja seolah-olah politik itu dapat berjalan.³⁸

Sayangnya saat ini, perkembangan politik hanya dikuasai dan dijalankan oleh segelintir kelompok saja, seperti aliansi tertentu. Terutama di zaman ini, saat segala hal telah ter-profesionalisasi sedemikian rupa, tak ada hal satu apapun yang tidak memiliki ahlinya. Para ahli ini menjadi basis-basis perkembangan suatu negara, sebab para ahli ini dibutuhkan suatu negara untuk mengembangkan teknologi tinggi dan kaya seperti Amerika sampai negara berkembang seperti Afrika selatan. Begitu pula dengan persoalan politik, hampir sepenuhnya dipegang oleh para ahli. Politik secara nyata telah didominasi oleh lembaga survey, lembaga penasihat politik, konsultan, spesialis media dan hubungan masyarakat. Meskipun ada beberapa relawan aktif, kadang dalam jumlah besar, namun memiliki peran ketat yang terbatas, dan keberadaan mereka tidak diharapkan bertindak dan berpikir mandiri.

Terutama dalam bidang politik, kelompok advokasi yang berbicara bahasa politik dan menyuarakan suara warga, tapi cara mereka mendefinisikan masalah sangat ditentukan oleh para profesional dan berbagai kegiatannya sangat diatur. Sesungguhnya saat politik dipegang oleh para profesional, warga negara berperan secara pasif, para warga hanya dimanipulasi secara emosional dan digunakan untuk melawan musuh-musuh politik di pihak lain. Sehingga hanya dengan politik

³⁷ Benedict J. Tria Kerkvliet, "Everyday Politics in Peasant Societies (and Ours)," *Journal of Peasant Studies* 36:1 (2009): 227–243.

³⁸ Harry C. Boyte, *Everyday Politics: Reconnecting Citizens and Public Life, Everyday Politics: Reconnecting Citizens and Public Life*, 2005.

komunitas warga negara non-profesional saja yang memiliki potensi besar untuk mematahkan tirani, tidak hanya di institusi formal seperti partai politik atau lembaga advokasi tapi di seluruh tatanan masyarakat modern.

Sedangkan secara luas politik dapat dibagi menjadi tiga, politik resmi, advokasi, sehari-hari. Politik resmi berkaitan dengan pemerintah dan organisasi resmi yang memperebutkan, membuat, menerapkan, dan mengubah terkait alokasi sumberdaya. Jangkauan mereka bisa dari hal yang bersifat formal, informal bahkan ilegal. Sedangkan, politik advokasi merupakan upaya langsung dan untuk melakukan berbagai konfrontasi mendukung, menentang, mengkritik, segala kebijakan atau seluruh cara sumber daya diproduksi dan didistribusikan. Bentuk perilaku model seperti ini juga bermacam-macam, tindakan yang bisa dilakukan bisa tampak ramah, sopan, damai, hingga bermusuhan, memberontak dan bahkan bisa menggunakan kekerasan. Politik advokasi bisa dilakukan individu, kelompok atau organisasi.

Berbeda dengan dua jenis politik yang telah disebutkan sebelumnya, politik dalam bentuk sehari-hari terjadi di tempat tinggal dan tempat kerja. Melibatkan orang-orang yang mendukung, menyesuaikan diri, menentang norma dan aturan, menentang otoritas produksi dan alokasi sumberdaya. Politik sehari-hari dilakukan dengan senyap, biasa-biasa saja, dilakukan secara tidak langsung dan untuk sebagian orang dilakukan secara pribadi untuk mendukung, memodifikasi, atau menolak prosedur yang berlaku, aturan, kebijakan, regulasi. Politik ini bisa saja melibatkan sedikit atau tanpa organisasi. Politik ini tampil dalam berbagai aktivitas seseorang dan kelompok kecil saat mereka mencari nafkah, saat bersama keluarga, bergumul dengan masalah sehari-hari. Politik sehari-hari berkaitan dengan berbagai orang yang relatif tidak berdaya, subordinat yang berhadapan dengan orang lebih kuat.

Politik sehari-hari bisa menjadi tempat pertama menyampaikan pemahaman masyarakat dan menilai sistem yang sedang berlangsung di lingkungan mereka tinggal dan bekerja. Seperti bisa kita contohkan kesibukan seorang petani di pedesaan. Berbagai kegiatan yang mereka lakukan sebagai petani mulai membajak sawah, menyemai benih tanaman, bercocok tanam, merawat tanaman, memanen dan berternak tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kebanyakan penduduk desa. Bisa saja penduduk desa yang tekun mengolah sawahnya menjadi bagian dari dukungan kebijakan bagi para petani. Sehingga aktivitas sekecil apapun yang dilakukan oleh petani, akan banyak melewati berbagai dialog yang tidak tampak, negosiasinya, dan persaingan berbagai produksi, pengendalian, dan distribusi sumber daya.

Politik sehari-hari juga dapat mempengaruhi model politik lain. Politik ini bisa juga dimasukkan ke dalam kategori politik advokasi, sebab keberadaannya dapat mempengaruhi otoritas dan wacana publik terhadap produksi dan alokasi sumberdaya. Seperti diketahui bahwa politik advokasi hanya terbatas pada kampanye untuk memobilisasi dukungan atau menentang kebijakan pemerintah. Sedangkan dikalangan penduduk desa sendiri tidak ada politik advokasi, tidak ada gerakan untuk mengubah kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Terkadang pernyataan mereka atas ketidakpuasan tersebut hanya disampaikan melalui berbagai interaksi di antara masyarakat.

Tidak bisa diremehkan bahwa perilaku masyarakat sehari-hari bisa mempengaruhi politik resmi, terlepas dari adanya kehendak atau tidak. Bisa dilihat bagaimana perilaku sehari-hari bisa melanggengkan pemimpin yang sedang menjabat, kebijakan yang ada, dan seluruh sistem politik. Atau sebaliknya perilaku sehari-hari dapat menyebabkan kematian karir pejabat tertentu, termasuk pemerintah atau rezim yang berkuasa. Hal tersebut terutama jika berkaitan dengan sistem politik yang berusaha mengatur pekerjaan seseorang, tempat tinggal, keluarga mereka, dan praktek keagamaan. Perilaku keseharian tersebut awalnya mungkin hanya berdampak secara lokal, tapi tidak tertutup kemungkinan dapat mempengaruhi secara nasional.

Elliot Turel menyatakan dalam karyanya bahwa perlawanan dan pemberontakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dibanyak kebudayaan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perkembangan. Terutama konflik terjadi di kelompok manusia dewasa, terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam sistem struktur sosial masyarakat yang hanya menguntungkan pemilik kekuasaan dan beberapa kelompok saja.³⁹ Keseharian orang dewasa mengalami berbagai macam konflik dan melawan standar moral suatu kebudayaan saat berurusan dengan seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi. Perlawanan ini sering berbentuk kecurangan yang bertujuan mengubah aspek sistem sosial yang dinilai tidak adil dan merugikan kesejahteraan kelompok.

Secara luas politik dibagi menjadi tiga, Politik resmi, advokasi, keseharian. Politik resmi berkaitan dengan pemerintah dan organisasi yang memperebutkan, membuat, menerapkan, mengubah dan mengubah terkait alokasi sumberdaya. Jangkauan mereka bisa dari hal yang bersifat formal, informal bahkan ilegal. Sedangkan politik advokasi melibatkan upaya langsung dan melakukan konfrontasi untuk mendukung, menentang, mengkritik, segala kebijakan atau seluruh cara sumber daya diproduksi dan didistribusikan. Bentuk perilaku model seperti ini bisa tampak ramah, sopan, damai, hingga bermusuhan, memberontak dan menggunakan kekerasan. Politik advokasi bisa dilakukan individu, kelompok atau organisasi.

Berbeda dengan dua jenis politik tersebut, politik keseharian terjadi di tempat tinggal dan tempat kerja. Melibatkan orang yang mendukung, menyesuaikan diri, atau menentang norma dan aturan, terhadap otoritas produksi dan alokasi sumberdaya. Politik keseharian dilakukan dengan senyap, biasa-biasa saja, dilakukan secara tidak langsung dan untuk sebagian orang secara pribadi mendukung, memodifikasi, atau menolak prosedur yang berlaku, aturan, kebijakan, regulasi. Politik ini melibatkan sedikit atau tanpa organisasi. Kegiatan ini ditampilkan dalam aktivitas individu dan kelompok kecil saat mereka mencari nafkah, merawat keluarga, bergumul dengan masalah sehari-hari. Politik jenis ini juga sering dikaitkan dengan orang-orang relatif tidak berdaya yang berhadapan dengan penguasa.

Politik sehari-hari bisa menjadi tempat pertama menyampaikan pemahaman masyarakat dan penilaian sistem di tempat mereka tinggal dan bekerja. Ambil contoh kegiatan bertani para petani di pedesaan, kegiatan seperti membajak sawah,

³⁹ Elliot Turel, "Resistance and Subversion in Everyday Life," *Journal of Moral Education* 32, no. 2 (2003): 115–130.

menyemaikan benih tanaman, bercocok tanam, merawat tanaman, memanen dan berternak tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kebanyakan penduduk petani desa. Bisa saja penduduk desa yang tekun mengolah sawahnya menjadi bagian dari dukungan kebijakan bagi para petani. Sehingga aktivitas sekecil apapun yang dilakukan oleh petani, akan banyak melewati berbagai dialog yang tidak tampak, negosiasinya, dan persaingan berbagai produksi, pengendalian, dan distribusi sumber daya.

Politik sehari-hari bisa juga masuk dalam kategori politik advokasi, karena keberadaannya dapat mempengaruhi otoritas dan wacana publik terhadap produksi dan alokasi sumberdaya. Bila politik advokasi hanya terbatas kampanye untuk memobilisasi dukungan bagi kebijakan pemerintah. Sedangkan di kalangan penduduk desa sendiri tidak ada politik advokasi, tidak ada gerakan untuk mengubah kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Terkadang pernyataan mereka atas ketidakpuasan tersebut hanya disampaikan melalui berbagai interaksi di antara masyarakat.

Tidak bisa diremehkan bahwa perilaku masyarakat sehari-hari bisa mempengaruhi politik resmi, terlepas dari keinginan atau tidak. Bisa dilihat bagaimana perilaku sehari-hari bisa melanggengkan pemimpin yang sedang menjabat, kebijakan yang ada, dan seluruh sistem politik. Atau sebaliknya perilaku sehari-hari dapat menyebabkan kematian karir pejabat tertentu, termasuk pemerintah atau rezim yang berkuasa. Hal tersebut terutama jika berkaitan dengan sistem politik yang berusaha mengatur pekerjaan seseorang, tempat tinggal, keluarga mereka, dan praktek keagamaan. Perilaku keseharian tersebut awalnya mungkin hanya berdampak secara lokal, tapi tidak tertutup kemungkinan dapat mempengaruhi secara nasional. Hanya dengan melakukan penelitian yang sifatnya mikroskopis dalam metodologi ilmu sosial tentang "kehidupan sehari-hari", memungkinkan peneliti untuk lebih memahami kehidupan sehari-hari dan ruang hidup subjek. Hal ini untuk melihat berbagai interaksi mereka di dalam ruang-ruang tersebut, dan struktur yang menentukan kehidupan normal dari beragam orang melalui terkumpulnya pengalaman spesifik individu.⁴⁰

D. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah, maka penelitian ini lebih memfokuskan tindakan individu dalam mengatasi berbagai persoalan terkait peminggiran dan diskriminasi. Sebab selama ini tidak banyak yang berfokus pada tindakan umum yang dilakukan oleh individu. Penghayat kepercayaan sebagai perseorangan bukan diwakili oleh lembaga atau tokoh yang merepresentasikan organisasi.

- 1) Bagaimana politik sehari-hari yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan di Tulungagung?
- 2) Bagaimana cara penghayat kepercayaan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan peraturan pemerintah dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Tulungagung?

⁴⁰ Changyong Choi, "Everyday Politics' in North Korea," *Journal of Asian Studies* 72, no. 3 (2013): 655-673.

- 3) Bagaimana praktek perdukunan digunakan sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat oleh penghayat kepercayaan di Tulungagung?
- 4) Bagaimana penghayat kepercayaan di Tulungagung menjelaskan dan mempertahankan keyakinannya di hadapan masyarakat yang tidak setuju?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

- 5) Untuk mengetahui Bagaimana politik sehari-hari yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan di Tulungagung.
- 6) Untuk mengetahui Bagaimana cara penghayat kepercayaan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan peraturan pemerintah dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Tulungagung.
- 7) Untuk mengetahui Bagaimana praktek perdukunan digunakan sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat oleh penghayat kepercayaan di Tulungagung.
- 8) Untuk mengetahui Bagaimana penghayat kepercayaan di Tulungagung menjelaskan dan mempertahankan keyakinannya di hadapan masyarakat yang tidak setuju.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah direncanakan tersebut, diharapkan kelak hasil penelitian dapat bermanfaat untuk:

- 9) Manfaat secara teoritis
Manfaat secara teoritis dari penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:
 - a. Pemahaman ilmu pengetahuan: Penelitian ini dapat memperluas pemahaman kita tentang bagaimana kelompok penghayat kepercayaan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan peraturan pemerintah dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Tulungagung.
 - b. Pembentukan teori: Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk membangun teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada tentang politik sehari-hari, cara penyesuaian diri, praktek perdukunan, dan penjelasan keyakinan oleh penghayat kepercayaan.
- 10) Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi Perguruan Tinggi UIN Satu Tulungagung
Sebagai lembaga yang menjadi tempat dan menjunjung tinggi toleransi. Hal ini menjadi penting untuk menegaskan posisinya sebagai lembaga yang membela kemanusiaan. UIN Satu Tulungagung merupakan tempat bagi semua golongan apapun Ras, golongan dan agamanya.

b. Bagi Penghayat Kepercayaan

Meskipun tampak tidak berdaya, sesungguhnya politik tidak hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan. Sebab kekuasaan itu sendiri bisa berada dimana saja. Kekuasaan memiliki sifat yang tersebar. Seperti pernyataan Michele Foucoult, bahwa dimana ada kekuasaan disitu ada perlawanan. Begitu juga dengan kelompok penghayat, meskipun tampak terus terpinggirkan, namun sesungguhnya banyak yang bisa dilakukan oleh kelompok ini.

G. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan jelas arah penelitian yang akan dilakukan. Maka peneliti merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

a. Abangan

Abangan merupakan istilah dari trikotomi yang dibuat oleh Clifford Geertz⁴¹ dalam karyanya berjudul “Agama Jawa”, *Abangan, Santri, Priyayi*. Mendasarkan karya tersebut, *abangan* merupakan istilah yang dipakai untuk kelompok yang masyarakat yang masih menjalankan agama Islam dengan ajaran leluhur. Mereka biasanya datang dari kelompok petani yang berada di pedesaan.

b. Penghayat Kepercayaan

Istilah ini merupakan sebutan yang lahir setelah kelompok ini kembali dihidupkan pada era orde baru di bawah Partai Golkar. Karena politik aliran, secara simplifikasi, mereka dianggap sebagai abangan. Mereka ini merupakan kelompok yang berfokus pada aktivitas yang berfokus pada dunia batin untuk berhubungan dengan Tuhan. Bisa juga kelompok ini disebut sebagai mistisisme Jawa.

c. Politik

Secara ringkas politik adalah soal siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana.⁴² Agar lebih jelas soal istilah ini, politik adalah berkenaan dengan segala aktifitas mengendalikan, mengalokasikan, produksi dan menggunakan sumberdaya, nilai, dan gagasan. Sumberdaya bisa soal tanah, air, uang, kekuatan, pendidikan, dan hal lain yang tampak atau tidak. Aktivitas memproduksi, mendistribusikan dan menggunakan sumberdaya juga melibatkan kerjasama, kolaborasi, hingga tawar-menawar, dan berbagai konflik akibat hal itu.

d. Sehari-hari

Sehari-hari merupakan kehidupan keseharian semua orang . layaknya suatu panggung dalam dramaturgi. Keseharian adalah kenyataan di belakang panggung. Bila di atas panggung kita dapat melihat berbagai peran yang dimainkan oleh aktor utama dan besar. Tapi sehari-hari lebih jauh melihat berbagai peran dibelakang panggung yang dimainkan oleh aktor yang selama ini dianggap tidak penting dan tampak tidak berperan. Hal ini sebagai cara seseorang melihat kenafian yang tampak dihadirkan di atas panggung saja. Politik sehari-hari adalah melihat cara seseorang melakukan sesuatu demi dirinya sendiri.

⁴¹ Geertz, Clifford. Agama Jawa. Clered Publishing, 2020.

⁴² Lasswell, Harold D. Politics: Who gets what, when, how. Pickle Partners Publishing, 2018.

H. Sistematika Pembahasan

Terdapat beberapa hal yang ingin diungkap melalui penyusunan Thesis berikut ini. Sehingga akan memaparkan beberapa hal di tiap-tiap sub bab masing-masing dalam penyusunan berikut ini:

Bab I berisi pendahuluan. Pada Bab ini akan dipaparkan tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

Bab II berisi tentang awal kehadiran Islam khususnya kedatangan Islam di Nusantara, rekognisi negara terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan, memuat tentang metode, jenis penelitian, pendekatan, kehadiran peneliti di lapangan, dan berbagai sumber data.

Bab III berisi tentang paparan data, temuan data dan analisis data. Pada bab ini memaparkan pendeskripsian hasil data dan juga temuan penelitian.

Bab V berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

Bab VI diakhiri dengan penutup dan kesimpulan.